

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Dalam Penelitian penelitian ini Peneliti telah mengambil beberapa tulisan penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian kali ini untuk menjadi bagian dari Kajian Terdahulu (*Previous Studies*) sebagai pedoman penelitian. Adapun tujuan dari kajian terdahulu yakni guna menganalisis informasi dan olah kajian penelitian yang sudah ada dengan tema relevan, untuk kemudian ditemukan ruang kosong bagi peneliti dalam melengkapi pembaharuan dalam kajian penelitian ini. Peneliti mengambil beberapa kajian terdahulu dalam bentuk karya ilmiah berupa jurnal. Dengan Peneliti berupaya meriset pembahasan jurnal dengan tema yang mendukung relevansi dari penelitian Peneliti.

Penelitian Pertama dengan judul “**NATO, Liberal Internationalism, And the Politics of Imagining The Western Security Community**” ditulis oleh Alexander Gheciu, terbit pada tahun 2019 di SAGE Journals. Dalam pembahasannya peneliti menyiratkan bahwa NATO acap kali dianggap sebagai contoh kesuksesan hasil pemikiran kelompok idealis dimana kehadiran Aliansi negara negara mampu menciptakan perdamaian dunia. Meski disadari NATO cenderung sekedar mewakili komunitas untuk mengisi penguatan kekuasaan kelompok Barat. Jelasnya terletak pada praktik keamanan kolektif dalam melawan sekutu blok timur.

Dipahami secara mendasar NATO terbentuk atas kesadaran untuk bersekutu terhadap norma dan nilai demokrasi liberal. Namun kondisi hari ini NATO dinyatakan mengalami kompleksitas internal dari benturan kekuatan politik konservatif di beberapa negara anggotanya. Pembahasan peneliti menekankan kepada keberadaan negara negara *Middle Power* mulai memiliki pengaruh signifikan di dalam dinamika Aliansi militer ini.

Dinamika dalam mengelola perbedaan internal mulai menghadapi tantangan baru akibat bentrokan interpretasi liberal dan non-liberal dari Barat. Dengan negara anggota itu yakni Turki dan Polandia, keduanya berpotensi memainkan keragaman peran internasional melalui identifikasi identitas dalam menyebar pengaruh haluan politik baru. Hal ini berpotensi menjadi hambatan dalam mempertahankan proses internasionalisme liberal dalam panggung global.

Peneliti memberi penjelasan akan posisi baru Turki dibawah kepemimpinan Erdogan yang membuat cukup khawatir NATO akan indikasi perpindahan kemitraan Turki dengan Barat. Hal ini merujuk kepada gaya kepemimpinan Erdogan yang menciptakan haluan demokrat konservatif yang juga berdampak kepada haluan penerapan kebijakan luar negerinya. Meninjau adanya pergeseran Turki menuju otoritarianisme akan juga berdampak kepada kesulitan NATO dalam mempertahankan narasi Aliansi akan gambaran institusi dengan norma demokrasi liberal.

Penekanan bahasan dalam penelitian ini ialah bagaimana NATO menangani dinamika kemunculan politik konservatif radikal atau sikap menyimpang dari norma demokrasi yang dilakukan Turki. NATO telah

mengadopsi strategi dua arah: mengekspresikan solidaritas yang berkelanjutan dengan Turki dalam perjuangannya melawan terorisme, pada saat yang sama juga memperingatkan Ankara tentang potensi konsekuensi serius yang dihadapi bila tidak menahan diri dalam pembentukan kerjasama militer dengan Rusia.

Penelitian Kedua dengan judul **“The Rise of Turkey: Impact Towards Regionalism”** ditulis oleh Shahrizan Sahari dan Noraini Zulkifli. Telah terbit pada tahun 2023 di Zulfaqar. Dalam penelitian ini, peneliti membahas Turki yang berupaya bangkit di tengah kontestasi negara adikuasa. Posisi Turki mampu selangkah lebih unggul dalam memperluas pengaruhnya di lingkup regional. Sosok Erdogan telah membentuk kebijakan luar negeri baru untuk mengubah Turki menjadi pemain global. Di era kepemimpinannya, pemerintahannya berhasil meningkatkan banyak fasilitas ekonomi dan sosial guna menarik para investor ke dalam negeri dari tahun ke tahun.

Adapun bahasan dari penelitian ini menekankan kepada teknik menganalisis kebangkitan Turki dan dampaknya dalam lingkup regional dengan fokus sektor perekonomian. Menyoroti faktor yang mendorong kebangkitan Turki, dampak posisi Turki di kawasan, serta potensi Turki untuk menjadi kekuatan baru. Peneliti berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang menunjang kebangkitan Turki diantaranya stabilitas politik, ekonomi, struktur masyarakat sosial, aspek keamanan yang kuat.

Hasil lainnya ialah menyoroti pola kajian kepemimpinan Erdogan dalam membentuk posisi kuat Turki dalam lingkup ekonomi yang meningkat,

kecerdasan dalam mengelola tatanan negara juga implementasi kebijakan luar negeri yang sejalan dengan kepentingan nasional, namun dikhususkan dalam lingkup kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

Penelitian Ketiga dengan judul **“Turkish Foreign Policy In A Changing World Order”** ditulis oleh Oğuzlu, H.T, terbit pada tahun 2020 di All Azimuth.

Olah kajian dari tulisan ini mengarah kepada pengamatan level sistem internasional dari unipolar menjadi multipolar. Peneliti menekankan sistem internasional sebagai faktor yang mendorong suatu negara mengamati celah tantangan dan peluang dalam membentuk arah kebijakan luar negerinya, dalam hal ini difokuskan kepada cara Turki sendiri. Tinjauan bermula dari posisi AKP sebagai partai yang berkuasa di Turki sejak tahun 2002 hingga seterusnya berhasil memenangkan perolehan suara yang berturut turut, di dorong sosok kepemimpinan kuat dari Recep Tayyip Erdogan.

Menggarisbawahi pentingnya lingkungan eksternal, hal ini telah membantu elit penguasa memenuhi agenda politik domestik, khususnya selama dekade pertama abad ke-21, tetapi juga berperan dalam membentuk preferensi dan perilaku kebijakan luar negeri Turki. Dengan bergesernya tatanan internasional memunculkan adu manuver yang baru dan beragam dari negara negara yang berusaha untuk bangkit menunjukkan kekuatan yang dimiliki. Tak terkecuali dengan Turki, yang juga berupaya memainkan kemampuan manuver kekuatan regional yang semakin meningkat.

Peneliti menunjukkan secara sederhana bagaimana tanggapan Turki terhadap perkembangan eksternal di tingkat regional dan sistemik sebagian besar sesuai dengan ekspektasi realis struktural. Adapun kebaruan peneliti dalam tulisan ini yakni memberikan penjelasan sederhana tentang bagaimana perubahan struktur tatanan internasional selama enam belas tahun terakhir yang tercermin dalam evolusi kebijakan luar negeri Turki. Menghasilkan tinjauan bagaimana strategi Turki dalam mempercepat keseimbangan persaingan dengan pendekatan multidimensi dalam memainkan daya tawar dalam menggeser kekuatan Barat.

Penelitian Keempat dengan judul “**Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisasi Turki Kontemporer**” ditulis oleh Ahmad Junaidi, terbit pada tahun 2016 di IN RIGHT. Dalam tulisannya memaparkan sosok Erdogan yang dikenal sebagai penghapus sekularisme warisan Mustafa Kemal Atatürk. Upayanya ingin mengembalikan kesadaran masyarakat Turki yang mayoritas penduduknya muslim dalam menegakan nilai nilai syariat Islam di kehidupan. Erdogan memiliki visi membentuk negara Turki dengan identitas Islam diiringi penguatan dalam segi pertahanan dan perekonomian, hingga membuat Turki diperhitungkan sebagai negara yang mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan perdamaian global.

Sekularisme masa Mustafa Kemal Atatürk, bertransformasi menjadi Islamisme Turki masa Erdogan. Capaian politik erdogan dengan pola kebijakan politiknya mengarah ke dalam konsep politik profetik, didalamnya meliputi tiga pilar yakni humanisasi, liberasi, transendensi. Dalam pilar humanisasi (memanusiakan manusia) segalanya berpusat kepada Tuhan dengan tujuan untuk

kepentingan manusia (kemanusiaan itu sendiri). Dalam Pilar Liberasi, mengarah ke Erdoganisme upaya nya mengajak dan meyakinkan masyarakat Turki untuk mencapai kembali kejayaan negara seperti masa kekhalifahan utsmani.

Dalam perspektif Peneliti, jika membicarakan sosok Erdogan, umumnya lebih terkesan dan menonjol sebagai politikus atau negarawan muslim, daripada aktivis dakwah. Kiprah Erdogan lebih dominan di ranah politik dengan dinamika keterlibatannya secara praktis. Namun demikian, segala pemikiran dan aktivitasnya secara substansi dapat kita maknai sebagai gerakan dakwah di ranah politik. Terlebih kentalnya komitmen orientasi politik Erdogan dengan ideologi Islam, yang disesuaikan dengan pandangan politik sekuler Negara Turki.

Penelitian Kelima dengan judul **“70 Years In NATO: Turkey as A Strategic Alliance”** ditulis oleh Melek Adsiz, terbit pada tahun 2022 di Çanakkale Araştırmaları Türk Yılığ. Dalam penelitiannya tersebut Adsiz membahas bagaimana proses keanggotaan Turki di NATO. Pemaparan umumnya menjelaskan hubungan Turki dalam Aliansi NATO memberikan keuntungan terhadap satu sama lain. NATO menjadi topangan dalam memprasaranaikan keamanan negara negara anggota dengan membentuk pertahanan kolektif dalam mencapai perdamaian dunia.

Perkembangan hubungan Turki dan NATO mengalami dinamisasi yang semakin kompleks. Lagi lagi faktor kepemimpinan sang presiden Turki yang membawa hubungan keduanya berada pada dilema komitmen kolektif sebagai Aliansi sekutu blok Barat. Turki yang kerap tegas menunjukkan penolakan akan

tiap persetujuan dari negara negara anggota lainnya menjadi sumbu ketegangan dari dinamika forum perAliansian ini.

Tidak dipungkiri, meski ketegangan akibat perbedaan pandangan dan kepentingan, negara anggota juga tak bisa melepas Turki begitu saja. Meski kerap dibuat geram oleh kepemimpinan Erdogan, keunggulan Turki dari segi letak geografis serta merunut kepada kontribusi yang sejalan dengan pencapaian tujuan dan pemenuhan kewajiban anggota NATO. Pokok pembahasan tulisan ini mengilas balik pembentukan Aliansi NATO dan ketergabungan Turki didalamnya yang telah berlangsung selama 70 tahun.

Adapun penulis akan melakukan penelitian mengenai kebangkitan Turki dengan menekankan pembahasan dalam menyoroti tingkat multipolaritas dalam tatanan sistem internasional. Dengan perubahan orientasi politik luar negeri negara itu yang semakin terasa nyata. Turki memanfaatkan celah kemunduran Barat untuk dapat bangkit dan mampu beradaptasi di tingkat multipolaritas dalam tatanan sistem internasional. Kebangkitan Turki menjadi salah satu contoh dari distribusi kekuatan dengan berupaya menyeimbangkan kekuatan di era kontestasi negara adikuasa serta memperluas pengaruh dan posisi strategis nya melalui tarik ulur kepentingan yang kerap menimbulkan gesekan kepentingan dengan status keanggotaannya di NATO.

Dalam hal ini, penulis mengamati beberapa faktor yang mendorong kebangkitan ini diantaranya faktor geopolitik dalam menjembatani kawasan Eropa dan Timur Tengah serta hasil dari aktor rasional yang giat menavigasi

penyesuaian atau reposisi negaranya dengan meninjau kepada realitas politik baru saat ini. Demikian juga menjadi faktor yang mendorong pembentukan citra Turki sebagai negara yang siap bersaing dalam panggung politik internasional. Meski hubungan dengan Aliansi semakin kompleks, Turki juga tak menangkak keanggotaannya di NATO juga menjadi upaya dalam mempertahankan diri dari ancaman serangan musuh.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Neorealisme

Neo-realisme muncul pada pertengahan abad ke-20 dikembangkan oleh Kenneth Waltz menanggapi kritik Liberalisme terhadap Realisme Klasik. Teori ini menjelaskan bagaimana negara berperilaku dalam sistem internasional dengan berfokus pada struktur sistem internasional itu sendiri. Apakah sistem itu unipolar, bipolar atau multipolar akan berdampak besar pada bagaimana negara-negara mendefinisikan orientasi internasional mereka.¹ Inti dari neo-realisme adalah konsep anarki, memahami bahwa tidak ada otoritas lain di atas negara. Membuat negara harus bergerak dalam keadaan *self-help* karena persaingan antar negara tidak dapat dihindari.

Kenneth Waltz juga membawa asumsi neorealis kepada bentuk distribusi kekuasaan. Yang dalam bahasan ini difokuskan dalam bentuk distribusi kekuasaan multipolar, yang mana muncul kehadiran kekuatan

¹ Mark V. Kauppi and Paul R. Viotti, *International Relations Theory*, New York, Rowman and Littlefield, 2020, p. 21-61

beberapa negara memegang dalam bersaing memperluas pengaruhnya. Sejalan dengan asumsi yang juga menekankan pentingnya keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dalam sistem internasional. Karenanya, Neorealis menghadirkan asumsi baru dimana dalam lingkup kebijakan luar pembentukan Aliansi atau kerjasama mungkin terjadi sebagai cara memaksimalkan upaya menjaga keamanan dan kelangsungan hidup sebuah negara.

Penggunaan teori ini relevan dalam menganalisis konteks penelitian mengenai kekuatan dan pengaruh Turki yang meningkat di kawasan. Secara khusus, karena Turki muncul sebagai pemain yang lebih kuat dalam keanggotaannya di NATO. Dengan posisi strategis Turki meliputi kekuatan militer dan keuntungan geopolitik yang dimiliki menjadi aspek kekuatan Turki dalam memperluas pengaruhnya dalam politik global.

2.2.2. Teori Keamanan Kolektif

Teori keamanan kolektif merupakan pendekatan hubungan internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas melalui upaya kolektif dari banyak negara. Mendasari adanya kesepakatan beberapa negara untuk beraliansi mencapai kepentingan yang sama. Keefektifan keamanan kolektif bergantung pada beberapa faktor, termasuk ukuran dan kekuatan kolektif, tingkat kepercayaan dan kerja sama di antara negara anggota, dan kemauan negara anggota untuk mengambil tindakan kolektif dalam menanggapi tindakan agresi.

Logika dasar dari keamanan kolektif meliputi dua hal yaitu keseimbangan (*Balancing*) dan pemikiran *All Against One*. Keduanya mendorong efektifitas dari praktek teori dalam menjaga stabilitas tatanan sistem internasional yang menguatkan hubungan kerjasama dibanding pemahaman konsep anarkis. Merujuk kepada tujuan utama NATO yang tercantum pada Pasal 5 dari Traktat Washington, menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, anggota lainnya akan memberikan bantuan seefektif dan seoptimal mungkin. Memahami bahwasanya konsep utama yang mendasari NATO adalah wujud keamanan kolektif.

Dalam teori ini juga dipahami dengan istilah pertahanan kolektif yang kerap digunakan secara sinonim dengan keamanan kolektif dalam konteks NATO. Istilah tersebut dijadikan sinonim oleh sebab didasari kepada gambaran konsep yang sama. Dalam pergerakannya, negara tetaplah negara yang memiliki pola kepentingannya dan prioritasnya masing masing. Demikian menjadi tantangan dan keterbatasan sendiri dalam implementasi praktek teori ini. Selain itu, keamanan kolektif dapat dirusak jika negara-negara anggota kekurangan sumber daya militer atau ekonomi untuk mencegah agresi secara efektif.² Teori ini relevan untuk digunakan dalam menganalisis keanggotaan Turki dalam Aliansi NATO. Dimana Turki telah menempatkan NATO di poros tengah kebijakan pertahanan dan keamanannya.

² Barkin, J. Samuel. "Collective Security." In *International Organization: Theories and Institutions*, pp. 85-99. Cham: Springer International Publishing, 2023.

2.2.3. Konsep Kebijakan Luar Negeri Netralitas Aktif

Netralitas didefinisikan sebagai status hukum suatu negara untuk memelihara sikap ketidakberpihakan di tengah situasi perang. Dimuat dalam Deklarasi Paris tahun 1856, dan Konvensi Den Haag tahun 1907. Konsep kebijakan luar negeri netralitas aktif berpendapat bahwa negara yang menjalankan bentuk kebijakan ini berusaha untuk mengambil posisi netral, namun tetap berupaya terlibat dalam pencapaian penyelesaian melalui diplomasi.

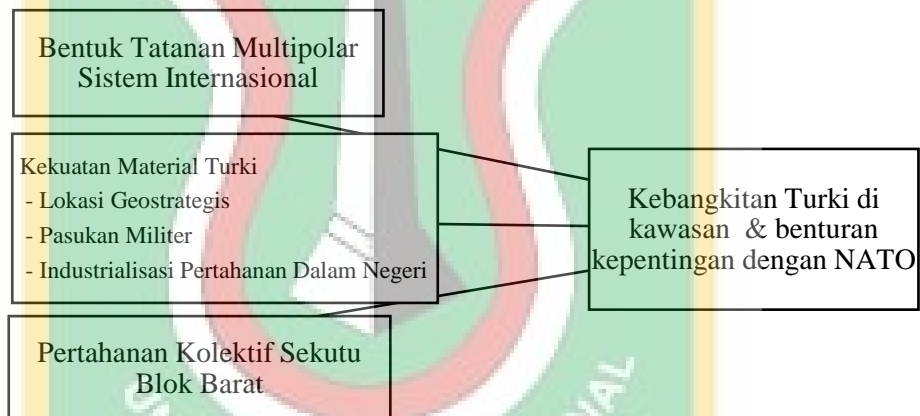
Konsep netralitas muncul pada abad keempat belas, dalam beberapa korespondensi diplomatik dan perjanjian yang berkaitan dengan non-partisipasi dalam konflik bersenjata antara monarki di Eropa.³ Berlanjut ke abad ketujuh belas, konsep netralitas memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Dalam tulisan ini konsep netralitas aktif Turki merujuk kepada pendekatan Turki untuk mencoba menyeimbangkan peranannya selaku mediator yang menjembatani Rusia dan Ukraina melalui inisiatif diplomatik untuk mencegah perluasan konflik. Dengan di sisi lain, menjadi langkah aktif Turki menandakan visi dan misi atas status keanggotaannya sebagai mitra Aliansi pertahanan sekutu Barat.

Berkaca kepada di masa Perang Dunia Kedua, pemerintah Turki berupaya mempertahankan status non-perangnya dalam bentuk kenetralan untuk menghindari terseretnya negara ke dalam konflik. Lokasi geo-

³ Lyon, Peter. 1960. "Neutrality and the Emergence of the Concept of Neutralism." *The Review of Politics* 22, no. 2: 256.

strategis Turki di persimpangan tiga benua memberikan posisi yang unik, sebagai hasilnya Turki mampu mencapai tujuan utamanya untuk menghindari kehancuran yang mengelilingi negara tersebut. Dalam kondisi dilema menghadapi pihak-pihak yang tengah bertikai. Tujuan dari konsep ini jelas sebagai upaya untuk suatu negara bertahan hidup secara sederhana. Konsep ini dilandaskan kepada bentuk kedaulatan dan demokratis suatu negara dalam menentukan posisinya di perpolitikan global.⁴

2.3. Kerangka Pemikiran



⁴ Tamkoc, M. 1976. The Warrior Diplomats: Guardians of the National Security and Modernization of Turkey. Salt Lake City, UT: University of Utah Press.